



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRIMULYANI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 959175

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 752.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m²/132 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 376.000.000
2. Tanah Seluas 250 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 376.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MOBIL BARANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.325.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 72.968.315**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.041.793.315

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.041.793.315



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.